

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Amiruddin, & Asikin, Z. (2016). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Arief, Barda Narawi. (2005). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, cetakan ketiga edisi revisi*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Arief, B. N. (2008). *Masalah Penegakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana.
- Dharma Jaya, I. S., Darmadi, A. Y., Hariyanto, D. R., Hartono, M. S., & Purnawan, K. W. (2016). *KLINIK HUKUM PIDANA (Komponen Persiapan dan Praktek)*. Denpasar: Udayana University Press.
- Eddy O.S. Hiariej. (2009). *Asas Legalitas dan Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana*. Erlangga: Jakarta.
- Effendi, T. (2013). *Sistem Peradilan Pidana*. Yogyakarta: Medpress Digital.
- Evi Hartanti. (2012). *Tindak Pidana Korupsi :Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika.
- IGM Nurdjana. (2009). *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi (Problematik Sistem Hukum Pidana dan Implikasinya pada Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi)*. Yogyakarta: Total Media.
- Ilham, B. (1998). *Sisten Hukum Indonesia*. Jakarta: Grafindo Persada.
- Ishaq. (2017). *Metode Penelitian Hukum dan Penelitian Skripsi, tesis, serta Desertasi*. Bandung: Alfa Beta.

J.T.C. Simorangkir, Rudy T.Erwin, dan Prasetyo. (2017). *Kamus Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Lamintang, P. (2018). *Dasar - Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Prasetyo, T. (2017). *Hukum Pidana* . Depok: PT RajaGrafindo Persada.

Soekanto, S. (2013). *Faktor - faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.

Soesilo, R. (2013). *Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar – Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia.

Syamsuddin, R., & Aris, I. (2014). *Merajut Hukum di Indonesia*. Jakarta: Mitra Wacana Media.

Wahyuni, F. (2017). *Dasar - Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Tangerang Selatan : PT Nusantara Persada Utama.

Waluyo, Bambang. (2008). *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.

#### **JURNAL/ARTIKEL**

Ali, M. (2007). Sistem Peradilan Pidana Progresif; Alternatif Dalam Penegakan Hukum Pidana. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 210-229.

Ansori, L. (2017). Reformasi Penegakan Hukum. *Jurnal Yuridis* , 16.

Bambang Hartono dan Zainudin Hasan. (2021). Implementasi Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam

Penyalahgunaan Anggaran Pendahuluan Belanja Kampung (APBK) Yang Dilakukan Oleh Oknum Mantan Kepala Kampung Menanga Jaya (Studi Kasus NOMOR: 13/PID. SUS-TPK/2020/PN. TJK). *IBLAM Law Review*, 1.3, 1–21.

Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Jurnal Gema Keadilan*, 14.

Derry Angling Kesuma. (2022). Implementasi Mutual Legal Assistensi (MLA) Dan Perjanjian Eksrtradisi Sebagai Upaya Indonesia Terkait Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi. *Lex LATA*, 3.1.

Dwi Santo , P. A. (2012). Tinjauan Tentang Subjek Hukum Korporasi dan Formulasi Pertanggungjawaban Dalam Tindak Pidana. *HUMANIORA Journal Binus*, 422 – 437.

Heri Joko Saputro dan Tofik Yanuar Chandra. (2021). Urgensi Pemulihan Kerugian Keuangan Negara Melalui Tindakan Pemblokiran Dan Perampasan Asset Sebagai Strategi Penegakan Hukum Korupsi. *Mizan: Journal of Islamic Law*, 273–90.

Ifrani. (2017). Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa. *Jurnal Al'Adl*, 9(3), 319-336.

Laia, L. D., Kebijakan Hukum Pidana Dalam Implementasi Hukuman Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia (Suatu Tinjauan Yuridis Nirmatif). *Jurnal Education And Development*, 208.

Leasa, E. Z. (2020). Eksistensi Ancaman Pidana Mati Dalam Tindak Pidana Korupsi Pada Masa Pandemi Covid19. *Jurnal Belo*, 6(1), 73-88.

Maryanto. (2012). Pemberantasan korupsi sebagai upaya penegakan hukum. *Jurnal Ilmiah CIVIS*, 2(2).

Miswardi, Nasfi, & Antoni. (2021). Etika, Moralitas, dan Penegak Hukum. *jurnal umsb*, 13.

Ogunleye, A. J., & Adebayo, S. O. (2012). Corruption and developmen in Nigeria: A pschological perspective. *Global Journal of Human Social Science Art and Humanitie*, 12(9).

Rofiq, A., Pujiyono, P., & Arief, B. N. (2021). Eksistensi Tindak Pidana Ta'zir dalam Kehidupan Masyarakat Indonesia. *Journal of Judicial Review*, 23(2), 241-256.

Supriyanta. (2009). KUHAP dan Sistem Peradilan Pidana Terpadu. *Wacana Hukum, UNISRI*, 1-13.

Ulang Mangun Sosiawan. (2020). Penanganan Pengembalian Aset Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi Dan Implementasi Konvensi PBB Anti Korupsi Di Indonesia. *Penelitian Hukum De Jure*, 20.

Widiastuti, Tri Wahyu. (2009). Korupsi dan Upaya Pemberantasannya. *Jurnal Wacana Hukum*, 8(2), 107-118.

Wuisan, R. (2020). Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Dalam Perkembangan Hukum Pidana. *Lex Crimen, ejournal unsrat*, 181 - 189 .

## **PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN**

Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana. Diundangkan di Jakarta Pada Tanggal 31 Desember 1981, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76.

UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No 31 Tahun 1999 tentang  
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-  
Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik  
Indonesia.

